



Kejati Periksa 120 Saksi

Korupsi Bansos Kota Pontianak

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah memeriksa sebanyak 120 orang saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar miliaran rupiah.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Didik Istiyanta mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan saksi sebanyak 500 surat panggilan yang ditujukan kepada para penerima bansos. Akan

Kami sudah panggil sebanyak 500 orang, tapi yang datang baru 120 orang. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi,"

Didik Istiyanta

tetapi, dari 500 orang yang dipanggil hanya kurang lebih 120 orang yang memenuhi panggilan. "Kami sudah panggil sebanyak 500 orang,

◆ Ke Halaman 15 kolom 5



Kejati Periksa 120 Saksi

Sambungan dari halaman 9

tapi yang datang baru 120 orang. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi," kata Didik, kemarin.

Menurut Didik, tidak ada kendala dalam penanganan kasus tersebut, hanya saja pihaknya harus kerja ekstra untuk memeriksa satu persatu berkas proposal yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan berkas. "Tidak ada kendala dalam penanganan kasus itu. Cuma memang kami harus kerja ekstra. Belum lagi kami harus memeriksa ribuan berkas proposal itu," jelasnya.

Selain itu, untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Pontianak Buchary A Rachman dan mantan Sekda Kota Ponti-

anak Hasan Rusbini tersebut, pihaknya harus melibatkan 15 penyidik. "Semua penyidik kami kerahkan. Semuanya ada 15 orang," katanya.

Kasus korupsi bansos ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan dua mantan pejabat Kota Pontianak sebagai tersangka, yakni Mantan Wali Kota Pontianak Buchary A. Rachman dan Mantan Sekretaris Pemerintah Kota Hasan Rusbini.

Menurut Didik, penyidikan kasus itu didasari laporan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Kota Pontianak. Selain itu, saat menggeledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pontianak, mereka menemukan dokumen kasus korupsi itu.

Sebelumnya berdasarkan hasil audit investigasi BPK menemukan indikasi kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp21,46 miliar.

Dalam laporannya kepada Pemerintah Kota Pontianak, BPK menemukan ada penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp16 miliar yang tidak sesuai dengan fungsinya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp 12,5 miliar.

Realisasi dana bantuan sosial 2007 sebesar Rp1,7 miliar dan dana APBD lainnya yang sebesar Rp 3,2 miliar digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Sementara ini belum ada penambahan tersangka," pungkas Didik. (arf)